

AKUNTABILITAS, KEBUTUHAN, PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN CSR BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA

Ali Darwin, Ak., MSc

(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan
Manajemen (IAI-KAM))

Perusahaan yang mengadopsi dan menjalankan konsep CSR dewasa ini telah mendapat perhatian dari kalangan kreditor (secara khusus perbankan) dan kalangan investor (secara khusus dunia pasar modal). Dalam praktik perusahaan dapat melaporkan implementasi CSR melalui laporan keberlanjutan. Dalam tingkat internasional, telah ada inisiatif (GRI) membuat panduan atau standar laporan keberlanjutan ini. Indonesia telah turut dalam upaya ini dengan membentuk lembaga serupa GRI yang dikenal sebagai NCSR. Ke depan perusahaan di Indonesia yang menerapkan dan melaporkan praktik CSR dengan baik perlu mendapatkan dukungan dan penghargaan, baik dari pemerintah ataupun kalangan pasar modal.

Corporate Social Responsibility (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat CSR) merupakan sebuah konsep yang tengah berkembang secara global dan penerapannya telah merambah ke semua sektor industri, termasuk industri yang selama ini kelihatannya "aman dan baik-baik saja", belakangan ini mulai disorot. Sebagai contoh, industri makanan dicela karena memproduksi makanan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit tertentu, supermarket dan hypermarket dikritik karena kebijakannya yang membuat pemasok dan produsen menjadi kekurangan margin jika tidak boleh dikatakan merugi, industri perbankan diserang karena membiayai proyek-proyek yang merusak lingkungan, dan industri asuransi diprotes karena kelalaiannya dalam menunaikan CSR. Suara-suara keras tersebut kerap dilontarkan melalui media massa oleh LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) yang dalam hal ini mereka bertindak mewakili

kepentingan masyarakat termasuk generasi yang akan datang sebagai bagian dari stakeholder dalam sistem tata kelola perusahaan. Selanjutnya skandal akuntansi yang membuat dunia heboh seperti Enron, WorldCom dan Ahold telah turut pula menambah daftar pendukung CSR dari sudut dimensi good corporate governance.

Contoh-contoh tersebut di atas hanya sekedar menunjukkan betapa CSR yang pada awalnya merupakan "isu panas" dalam industri pertambangan (terutama di Indonesia) dan pada supply chain di beberapa negara berkembang (contoh kasus Nike dan Gap), kini telah menyebar secara luas mencakup semua jenis industri (tentu saja dengan kadar yang berbeda) sehingga tidak ada lagi industri yang kebal terhadap isu CSR. Bahkan organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi pun mulai peduli dan mengimplementasikan konsep CSR, misalnya dalam bentuk kebijakan "*Kampus Berwawasan Lingkungan*" atau "*Green Campus*".

CSR Itu Apa Sih?

Meskipun penerapannya telah merambah ke semua sektor industri, namun persepsi terhadap CSR masih belum sama. Makanya, istilah CSR mempunyai berbagai interpretasi dan penamaan lain, seperti; *corporate citizenship*, *the ethical corporation*, dan *corporate sustainability*. Secara dangkal, CSR dipersepsikan sebagai kegiatan donasi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate philanthropy*), sedangkan interpretasi secara luas menganggap aktivitas CSR bukan hanya sekedar *corporate philanthropy*. CSR pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme pengintegrasian isu sosial dan isu lingkungan ke dalam operasi perusahaan, dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para stakeholder. Oleh sebab itu, CSR dianggap sebagai rerangka strategi baru untuk meningkatkan daya saing dan mencapai bisnis berkelanjutan.

Meskipun isu utamanya akan berbeda baik antar sektor industri maupun antar perusahaan, namun secara umum isu CSR mencakup 5 (lima) komponen pokok. *Pertama*, *Hak azasi manusia (HAM)*; Bagaimana perusahaan menyikapi masalah HAM dan strategi serta kebijakan apa yang dilakukan oleh perusahaan

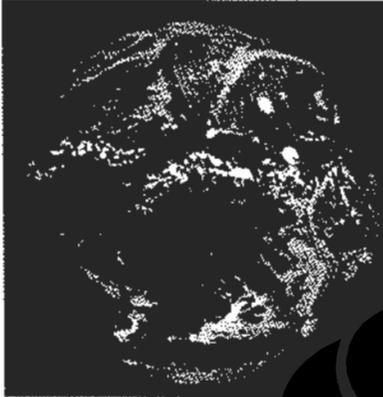
untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM di perusahaan yang bersangkutan. *Kedua, Tenaga Kerja (Buruh)*; Bagaimana kondisi tenaga kerja di supply chain atau di pabrik milik sendiri mulai dari soal sistem penggajian, kesejahteraan hari tua dan keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan profesionalisme karyawan, sampai pada soal penggunaan tenaga kerja di bawah umur. *Ketiga, Lingkungan Hidup*; Bagaimana strategi dan kebijakan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Bagaimana perusahaan mengatasi dampak lingkungan atas produk atau jasa mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada masalah buangan limbah, serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi dan distribusi produk. *Keempat, Sosial - Masyarakat*; Bagaimana strategi dan kebijakan dalam bidang sosial dan pengembangan masyarakat setempat (community development), serta dampak operasi perusahaan terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. *Kelima, Dampak Produk dan Jasa terhadap Pelanggan*; Apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan jasa bebas dari dampak negatif seperti; mengganggu kesehatan, mengancam keamanan, dan produk terlarang.

Dari 5 komponen tersebut terlihat jelas bahwa cakupan CSR sangat luas, bukan hanya terbatas pada masalah sosial semata, seperti: sumbangan untuk panti jompo, donor darah, sumbangan bencana alam, atau bantuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Makanya, untuk terhindar dari persepsi dangkal seperti itu, kalangan tertentu merasa lebih pas bila menggunakan terminologi *corporate sustainability* ketimbang CSR. Terminologi yang terakhir lebih mencerminkan pula adanya perwujudan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dari perspektif dunia usaha.

Bagaimana Perkembangan CSR

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA

Cakupan CSR yang demikian luas merupakan hasil dari sebuah perjalanan panjang konsep CSR. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru, tetapi apa yang ada sekarang merupakan penyempurnaan dari apa yang sudah ada sebelumnya, begitu pula halnya dengan CSR. Sejak abad ke 15, perusahaan sudah



menghadapi tekanan dari dua sisi, yaitu tekanan untuk mencetak laba dari sisi pemilik dan tuntutan untuk memenuhi fungsi sosial dari sisi masyarakat. Sebagai contoh: bisnis yang dilakukan ke manca negara (dengan menggunakan armada pelayaran) oleh bangsa Portugis, Belanda, Spanyol dan Inggris dikecam karena banyak kegiatan operasinya yang melanggar HAM, perdagangan budak dicela habis-habisan dan

mendapat perlawanan keras, perdagangan yang dilakukan oleh VOC dinilai telah merampas hak-hak rakyat lokal, perlakuan yang jelek terhadap kondisi dan kesejahteraan kaum buruh di Inggris pada abad ke 19 telah memicu terjadinya pergolakan kaum buruh di beberapa kota industri di Inggris.

Jadi, tuntutan terhadap CSR dalam bentuk sederhana sudah muncul sejak 5 abad yang silam. Sedangkan perkembangan CSR secara konseptual baru mulai dikemas sejak tahun 1980-an yang dipicu sedikitnya oleh 5 (lima) variabel berikut: (1). Maraknya fenomena "take over" antar korporasi yang kerap dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial. (2) Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangnyah paham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara global. (3) Meluasnya operasi perusahaan multi nasional di negara-negara berkembang. Banyak perusahaan multi nasional, termasuk di Indonesia, yang dituntut supaya memperhatikan: HAM, kondisi sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh, persis sama dengan yang terjadi pada waktu revolusi industri dua abad yang lalu. (4) Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik (pemerintah) hampir di seluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM (termasuk asosiasi profesi) yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan sampai pada kekuatiran akan punahnya berbagai spesies baik hewan maupun tumbuhan sehingga ekosistem semakin labil. (5) Adanya kesadaran dari

sektor korporasi akan arti penting merk dan reputasi korporat dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan. Semakin signifikan merk bagi suatu perusahaan, dengan menggunakan CSR, akan semakin kokoh pertahanan terhadap serangan atas reputasi perusahaan.

Perhatian Investor Terhadap CSR.

Perkembangan CSR yang begitu cepat disambut dengan antusias oleh para investor termasuk para bankir. Hal ini ditandai dengan berkembangnya Socially Responsible Investment (SRI) sejak beberapa tahun terakhir. Sedangkan kepedulian industri perbankan terhadap CSR ditandai dengan disepakatinya *the Equator Principles* (EPs), yaitu suatu sistem dan prosedur "screening" yang ketat guna menilai risiko CSR terhadap proyek-proyek yang mempunyai dampak lingkungan signifikan sebelum kredit diluncurkan. EPs pada mulanya disepakati oleh 10 bank internasional di Inggris pada tahun 2002. Saat ini tercatat sedikitnya 40 bank di seluruh dunia yang telah menandatangani EPs yang artinya adalah bahwa bank-bank tersebut, dimana pun mereka beroperasi, setuju akan menggunakan EPs sebagai basis dalam menilai kelayakan proposal kredit yang diajukan oleh calon debitur yang kegiatan operasinya berdampak signifikan terhadap lingkungan. Namun, patut disayangkan, sampai saat ini belum satupun bank nasional di Indonesia yang ikut menandatangani EPs. Hal ini tentu saja akan membawa konsekuensi buruk dalam industri perbankan di Indonesia yaitu adanya perlakuan yang tidak setara antar bank dalam prosedur penilaian risiko CSR calon debitur. Bank yang terikat dengan EPs cenderung melakukan screening secara lebih ketat ketimbang bank yang belum menandatangani EPs.

Kemudian di sektor pasar modal, perhatian investor terhadap CSR juga semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan munculnya indeks saham seperti FTSE4Good dan Dow Jones Sustainability Index (DJSI) sejak beberapa tahun belakangan ini. Dalam kaitan ini, pasar modal Indonesia sebagai bagian dari pasar modal dunia yang memiliki investor tanpa batas negara, sudah waktunya untuk

mempunyai indeks saham sejenis DJSI atau FTSE4Good agar pasar modal di negara kita lebih bergairah terutama bagi SRI.

Pengungkapan Kinerja CSR Melalui Laporan Keberlanjutan

Perusahaan yang sukses dalam menjalankan CSR memiliki tiga nilai dasar (*core values*) yang ditanam secara mengakar dalam perusahaan, yaitu: (1) *ketangguhan ekonomi*, (2) *tanggungjawab lingkungan*, dan (3) *akuntabilitas sosial*. Jika kinerja keuangan suatu perusahaan tercermin dalam laporan keuangan, maka kinerja CSR akan dapat disimak melalui sebuah laporan yang disebut "*laporan keberlanjutan*" (*sustainability report*). Dalam prakteknya, ada yang menggunakan nama lain untuk laporan jenis ini, misalnya: laporan CSR (*corporate social responsibility report*), laporan sosial (*social report*), laporan lingkungan (*environmental report*), atau laporan sosial dan lingkungan (*social and environmental report*). Laporan CSR atau Laporan keberlanjutan pada hakekatnya memuat tiga aspek pokok yaitu; ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh sebab itu, laporan ini disebut juga "*triple bottom line reporting*", atau "*three-in-one reporting*".

Tabel 1: Contoh Indikator Kinerja

Economic Performance:	Environmental performance:	Social Performance:
<ul style="list-style-type: none"> • Revenue • Operating cost • Employee compensation • Donation and other community investment • Payments to capital providers and to governments. • Coverage of the organisation's defined benefit pension plan obligation 	<ul style="list-style-type: none"> • Weight of materials used • Direct energy consumption • Total water withdrawal • Description of significant impact of activities on protected area. • Percentage of products sold that is reclaimed at the end of the products' useful life • Incidents of, and fines or non-monetary sanctions for, non-compliance with applicable environmental regulations. • Greenhouse gas emissions • Coverage of the organisation's defined benefit pension plan obligation 	<ul style="list-style-type: none"> • Percentage of employees represented by independent trade union organisation. • Average hours of training per year per employee. • Percentage of major suppliers and contractors that underwent screening on human rights. • Extent of training and risk analysis to prevent corruption. • Program and practices for assessing and managing the impacts of operations on communities, including entering, operating and exiting.

Apa saja yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan? Laporan ini mengungkapkan visi, misi, kebijakan, dan strategi perusahaan terutama yang berhubungan dengan ketiga aspek tersebut

(ekonomi, lingkungan dan sosial). Laporan juga mengungkapkan profile ringkas perusahaan, parameter yang digunakan dalam laporan, tata kelola dan komitmen-komitmen, serta tata hubungan dengan stakeholders. Pengukuran kinerja CSR dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang dikelompokkan dalam tiga aspek kunci keberlanjutan (ekonomi, lingkungan, dan sosial). Dalam Draft pedoman laporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh GRI, telah disediakan seperangkat indikator untuk menilai kinerja keberlanjutan, yaitu: 9 indikator kinerja ekonomi, 30 indikator kinerja lingkungan, dan 40 indikator kinerja sosial. Sebagai contoh, pada tabel 1 disajikan beberapa indikator kinerja dimaksud. Dari tabel tersebut patut digaris bawahi bahwa isu korupsi ternyata merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja sosial.

Pengungkapan kinerja CSR melalui laporan keberlanjutan kini semakin penting terutama untuk membuat keputusan investasi jangka panjang. Melalui laporan ini akan terungkap: apakah perusahaan sudah menjalankan akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal. Untuk membangun akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal, perusahaan bukan hanya diminta patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga mengikuti *best practice*, norma-norma, konsensus-konsensus, dan inisiatif-inisiatif yang diprakarsai oleh berbagai institusi atau asosiasi industri terutama yang terkait dengan isu CSR. Di samping itu, perusahaan harus bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan kepada stakeholders, mengembangkan nilai-nilai (*values*) yang diyakini dalam budaya perusahaan untuk dianut oleh seluruh karyawan, serta merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. membangun hubungan yang baik dan terorganisir dengan

para stakeholder (*stakeholder engagement*), dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, manajemen harus melaksanakan: kebijakan yang telah digariskan, prosedur yang telah ditetapkan, dan komitmen yang telah disepakati.

Selain daripada itu, melalui laporan keberlanjutan akan terungkap apakah tingkat keterbukaan perusahaan sudah satu level dengan harapan masyarakat, sampai sejauh mana perusahaan memahami ekspektasi para stakeholder, apa yang menjadi perhatian stakeholders dan bagaimanakah perusahaan menyikapinya?, dan sampai sejauh manakah manajemen mengenali dan peduli tentang apa yang dimaksud dengan dampak lingkungan. Lebih dari itu, dengan membuat laporan keberlanjutan akan terungkap apakah perusahaan sudah mengungkapkan informasi secara transparan dan jujur, termasuk informasi negatif.

Standar Laporan Keberlanjutan

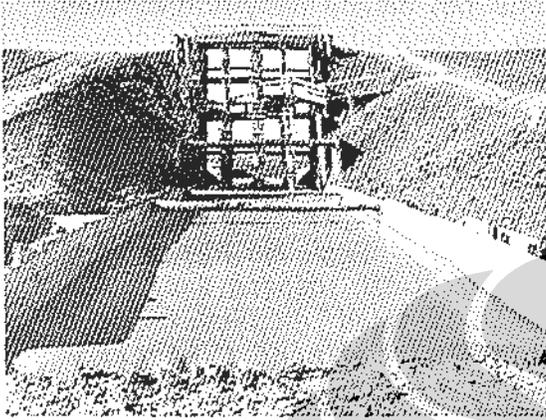
Suatu laporan dinilai bermutu apabila penyusunannya berpedoman pada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang berterima umum, begitu pula halnya dengan laporan keberlanjutan. Pada tingkat global, sejak tahun 2000 telah dikembangkan standar laporan keberlanjutan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*. GRI adalah sebuah lembaga independen, didirikan pada tahun 1997 di Boston AS, sekarang berpusat di Belanda. Pada tahun 2002 lahirlah standar generasi kedua yang disebut GRI Guidelines 2002 sebagai pengganti standar sebelumnya. GRI Guidelines 2002 diluncurkan ketika *World Summit for Sustainable Development* tahun 2002 di Johannesburg. Setelah standar tersebut diterapkan selama tiga tahun, banyak masukan perbaikan dari penggunaannya sehingga sejak akhir tahun 2005 GRI kembali bekerja menyiapkan revisi GRI Guidelines 2002. Peluncuran standar laporan keberlanjutan generasi ketiga ini yang disebut "GRI's G3 Guidelines" akan dilaksanakan pada awal Nopember 2006, berbarengan dengan acara "*Global conference on transparency and sustainability*" di Amsterdam, Belanda.

Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia? Apakah harus mengacu pada GRI Guidelines dalam menyusun laporan keberlanjutan? Jawabannya ya, karena kita belum mempunyai standar nasional. Saat ini hampir 1.000 organisasi/perusahaan menggunakan GRI Guidelines sebagai rujukan dalam membuat laporan keberlanjutan. Indonesia juga perlu memiliki standar tersendiri yang merupakan konvergensi atas GRI Guidelines. Konvergensi ini penting agar investor dan stakeholders lainnya dapat memperoleh informasi sustainability dalam format yang sama dengan standar global. Untuk itulah, dengan diprakarsai oleh IAI-KAM pada pertengahan 2005, telah didirikan lembaga semacam GRI yang diberi nama "*National Center For Sustainability Reporting (NCSR)*". Lembaga independen ini memiliki misi : "*Menyusun dan menyebarkan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan untuk organisasi/ perusahaan di Indonesia*". Diharapkan lembaga independen ini dapat diakui oleh regulator dan masyarakat sebagai institusi yang credible dan berkompeten dalam menyusun standar laporan keberlanjutan untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi di Indonesia.

Praktik Pelaporan Keberlanjutan

Dari survei yang dilakukan oleh ACCA, organisasi profesi akuntan di Inggris, dilaporkan bahwa penerbitan laporan keberlanjutan telah muncul sejak tahun 1990 dalam bentuk laporan lingkungan (*environmental report*). Pada tahun 2003 sekitar 1200 perusahaan telah menerbitkan laporan ini, terutama di kawasan Eropa (54%), dan Asia & Australia (25%). Di kawasan Asia, laporan keberlanjutan dalam bentuk laporan lingkungan muncul di Malaysia sejak tahun 1999. Di Singapore laporan ini mulai dipublikasikan pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2003 sebanyak 14% dari 160 perusahaan publik di Singapore telah mempublikasikan laporan lingkungan.

Di Jepang laporan lingkungan muncul sejak tahun 1993. Kesadaran untuk menerbitkan laporan ini meningkat setelah di tahun 2001 pemerintah Jepang mengeluarkan pedoman penyusunan laporan lingkungan. Hasilnya, pada tahun 2003 lebih dari 380 perusahaan besar di Jepang telah mengeluarkan laporan lingkungan. Dari 100



perusahaan terbesar di Jepang, 78% di antaranya telah menerbitkan laporan lingkungan pada tahun 2003. Jepang merupakan negara yang paling peduli terhadap penerbitan laporan keberlanjutan. Oleh sebab itu pengguna GRI Guidelines terbanyak pada tingkat global berasal dari Jepang. Di Hong Kong laporan ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1997, kemudian sejak itu

hingga tahun 2003 sudah 20 perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan secara rutin setiap tahun.

Bagaimana dengan di Indonesia? Diyakini bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan aktivitas CSR di lapangan. Akan tetapi belum banyak yang mengungkapkan aktivitas tersebut dalam sebuah laporan. Hanya beberapa perusahaan yang telah mengungkapkan informasi lingkungan dan tanggungjawab sosial di dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa di antaranya membuat laporan CSR tersendiri, terpisah dari laporan tahunan. Dari kegiatan Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA) 2005 yang diselenggarakan oleh IAI-KAM terungkap bahwa hanya sekitar 10% dari perusahaan publik di Indonesia yang mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan 2004, sedangkan perusahaan yang membuat laporan secara terpisah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Diharapkan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan terpisah akan semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari penyelenggaraan ISRA secara tahunan oleh IAI-KAM, di samping meningkatnya kesadaran perusahaan.

Jadi, dibandingkan dengan negara lain, harus diakui bahwa perkembangan praktik laporan keberlanjutan di Indonesia berjalan

lambat. Jika penyusunan laporan keuangan diwajibkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk laporan keberlanjutan belum ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pembuatan laporan tersebut. Apakah ini yang menyebabkan kenapa banyak perusahaan enggan menyiapkan laporan keberlanjutan? Sejatinya, penyusunan laporan keberlanjutan di berbagai negara masih bersifat volunter, kecuali Jepang dan Perancis, kedua negara ini sudah mewajibkan perusahaan tertentu untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Bagaimana dengan di Indonesia? Untuk mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia masih perlu waktu terutama kesiapan dalam sistem pendukung seperti adanya standar pelaporan yang berterima umum dan ketersediaan tenaga yang berkompeten untuk menyusun laporan tersebut, termasuk tenaga yang melakukan fungsi assurance. Oleh sebab itu sementara sistem dan perangkat pendukungnya belum tersedia, pelaporan tersebut di Indonesia masih dilakukan secara volunter. Penulis berpendapat bahwa kewajiban pembuatan laporan keberlanjutan bagi perusahaan tertentu di Indonesia baru dapat diberlakukan secara efektif untuk laporan mulai tahun 2009 yaitu setelah sistem dan perangkat pendukungnya tersedia. Untuk itu, promosi dan pendidikan CSR dan laporan keberlanjutan harus mendapat perhatian dari asosiasi profesi dan lembaga pendidikan, di samping dukungan dari pemerintah.

Namun, untuk mempercepat proses dan sebagai pembelajaran serta untuk meningkatkan kesadaran manajemen akan arti penting informasi lingkungan dan sosial, maka regulator dapat mengeluarkan himbauan (bukan wajib) kepada perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan. Sedangkan pembuatan laporan secara terpisah sangat dihargai.

Kesimpulan

CSR bukan hanya kegiatan donasi perusahaan (corporate philanthropy), tetapi cakupannya jauh lebih luas daripada itu, mencakup isu: HAM, buruh, lingkungan hidup, dan sosial-masyarakat sampai pada dampak produk terhadap pelanggan.

Oleh karena cakupannya yang demikian luas, maka CSR dianggap sebagai kerangka strategi baru untuk meningkatkan daya saing. Oleh sebab itu kebutuhan informasi kinerja CSR kini semakin meningkat. Bagi investor, informasi kinerja CSR diperlukan untuk pembuatan keputusan investasi jangka panjang. Bagi industri perbankan, informasi kinerja CSR diperlukan untuk dasar persetujuan kredit. Bank-bank yang tergabung dalam the *Equator Principles* (seperangkat sistem dan prosedur "screening" calon debitur) akan melakukan penelitian yang ketat atas risiko lingkungan dan sosial calon nasabah. Kemudian di sektor pasar modal, kini telah tersedia pula indeks saham untuk mengakomodir *Socially Responsible Investment* (SRI), seperti FTSE4Good dan Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Dalam kaitan ini, Penulis berpendapat bahwa sudah waktunya pula bagi Indonesia untuk mempunyai indeks saham sejenis ini.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, perusahaan perlu mengungkapkan kinerja CSR dalam "laporan CSR" atau "*laporan keberlanjutan*" (*sustainability report*). Melalui laporan ini akan terungkap apakah tingkat keterbukaan perusahaan sudah satu level dengan harapan masyarakat. Laporan sebaiknya dibuat berdasarkan standar pelaporan yang berterima umum. Pada tingkat global, standar laporan keberlanjutan dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), berpusat di Belanda. Indonesia perlu mempunyai standar nasional yang merupakan konvergensi atas GRI Guidelines. Sementara standar nasional belum tersedia, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menggunakan GRI Guidelines sebagai rujukan.

Di Indonesia banyak perusahaan yang telah menjalankan CSR tapi sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Hal ini terjadi mungkin karena kita belum mempunyai sarana pendukung seperti; standar pelaporan, tenaga terampil (baik penyusun laporan maupun auditornya), dan institusi atau lembaga pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi yang diperlukan. Di samping itu, promosi dan kesadaran akan arti penting laporan CSR, juga dirasakan masih kurang. Oleh sebab itu sementara prasarana pendukungnya belum tersedia maka pembuatan laporan keberlanjutan belum dapat diwajibkan di Indonesia, namun untuk meningkatkan kesadaran dan

mempercepat proses pembelajaran, maka regulator perlu mengeluarkan himbauan (bukan wajib) untuk pembuatan laporan tersebut. Penulis berpendapat bahwa kewajiban pembuatan laporan keberlanjutan di Indonesia baru dapat diberlakukan secara efektif pada tahun 2009.(***)

Referensi:

The Association of Chartered Certified Accountants. *An Introduction to Sustainability Reporting for Organisation in Indonesia*. 2004.

Ali Darwin. *Laporan Keberlanjutan; Kompetensi Baru Profesi Akuntan Manajemen?*. Economics Business & Accounting Review (eBAR), Edisi II/April 2006.

The Global Reporting Initiative. *GRI Guidelines*, 2002.

The Global Reporting Initiative. *Sustainability Reporting Guidelines; G3 Version for public comment 2 January 2006 - 31 March 2006*. 2006.

Hopkins, Michael dan Cowe, Roger. *Corporate Social Responsibility: Is there Business Case?*. The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).